



## **Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Studi Kasus : Peranan Etnis Tionghoa Dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017

Oleh

**Muhammad Saleh<sup>1</sup>, Yuslim<sup>2</sup>, Bakaruddin Rosyidi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP Unand, Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup>FISIP Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>1</sup>[alemuhammad.kpu@gmail.com](mailto:alemuhammad.kpu@gmail.com), <sup>3</sup>[bakrandalas@gmail.com](mailto:bakrandalas@gmail.com)

---

### **Abstract**

*The decentralization politics that occurred in the era of reformation has encouraged the ambition of the ethnic identity politics which give a big contribution in the appearance of small kings in every region. Schmitterian explained that liberalization politics will activate the certain rights that be owned by each person individually and social groups and cover them from the cruel deeds or the third group. At the level of ethnic at least liberalization can be seen from the availability of spaces for every society to form their own community that can protect their rights, and also the decrease of the intervention of the nation in the political appreciation of every group.*

Diterima : 22 Agustus 2018  
Direvisi : 18 September 2018  
Diterbitkan : 28 September 2018

Kata Kunci :  
*Politics Liberalization,  
Ethnic Identity Politics,  
Democratic*

### **Abstrak**

Politik desentralisasi yang terjadi di era reformasi telah mendorong ambisi politik identitas etnis yang memberikan kontribusi besar dalam penampilan pemimpin di setiap daerah. Schmitterian menjelaskan bahwa politik liberalisasi akan mengaktifkan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh setiap orang secara individual dan kelompok sosial dan menutupi mereka dari perbuatan kejam atau kelompok ketiga. Pada tingkat etnis setidaknya liberalisasi dapat dilihat dari ketersediaan ruang bagi setiap masyarakat untuk membentuk komunitas mereka sendiri yang dapat melindungi hak-hak mereka, dan juga menurunnya intervensi bangsa dalam apresiasi politik setiap kelompok.

---

## **Pendahuluan**

Hampir setiap daerah di Indonesia pada tahun 2017 serentak melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) baik untuk tingkat Gubernur/Walikota/maupun Bupati. Ironisnya, hampir seluruh kegiatan pilkada yang berlangsung di berbagai daerah menunjukkan sebuah gejala yang sama dimana, geliat politik identitas etnis begitu terasa kuat untuk memperebutkan kekuasaan dalam kontestasi politik lokal. Elit politik lokal yang haus akan kekuasaan sepertinya sengaja memanfaatkan komunitas-komunitas lokal sebagai bentuk akumulasi modal yang sangat berharga yang menjadi mesin pendulang suara ditengah merosotnya kinerja partai politik. Jika kita berpatokan kepada pemikiran demokrasi yang direkomendasikan oleh O'Donnel dan Schmitter, maka pilkada yang telah bergulir sejak tahun 2004 telah memenuhi standar pembangunan demokrasi di ranah lokal, seperti terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung, terciptanya substitusi kepemimpinan daerah, dan terjadinya pendidikan bagi politik bagi masyarakat luas (Lay: 2005). Hanya saja, pilkada dan prospek pembangunan demokrasi di tingkat lokal masih mencemaskan.

Daerah-daerah yang tidak memiliki mayoritas etnis dan tidak mendapatkan ruang kebebasan pada masa Orde Baru, justru menjadikan Pilkada sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan pengukuhan politik di masyarakat yang plural. Hasil Lingkaran Survei Indonesia tahun 2008 menyebutkan bahwa, daerah yang tidak memiliki mayoritas etnis seperti Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara politik etnik cenderung menguat dalam pemilihan kepala daerah (LSI :09:2008). Sebagai contoh, Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Tahun 2017 yang lalu juga terdapat peranan etnis tionghoa. Pengurus dalam INTI (Indonesia Tionghoa) Kota Tebing Tinggi menggerakkan sesama etnis tionghoa yang tergabung dalam perkumpulan tersebut untuk memilih kotak kosong dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017. Dalam hal ini tentu pengurus INTI Kota Tebing Tinggi tersebut ingin terlibat dalam permainan politik dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat umum.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia

baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya sebagai penunjang dari penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan khusus, seperti data-data yang dihimpun dari informan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, sehingga pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini lebih menekankan pengumpulan data melalui:

1. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah penelitian yang dilaksanakan.

Adapun informasi yang diperoleh melalui informan, yaitu : Masyarakat Kota Tebing Tinggi (dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*).

2. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari sumber non manusia seperti halnya laporan, buku catatan, dokumen atau naskah serta sumber lain. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dokumen/laporan/berita di media massa terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Bangkitnya Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada**

Keterlibatan etnis dalam ranah politik sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Dekade 1970/1980-an di negara-negara Benua Afrika seperti Nigeria, Somalia, kekuatan etnik mempunyai peranan penting dalam hal penentuan jabatan-jabatan politik. Untuk di Indonesia, geliat etnis untuk masuk dalam ranah politik praktis terjadi setelah liberalisasi politik yang bergulir sejak tahun 1998. Liberalisasi politik menjadi

titik awal *-terminus a quo-* (Gaffar: 1999) yang mengawali transisi politik dari penguasa otoriter yang selama ini telah membelenggu hak-hak individual ataupun kelompok tertentu. Bangkitnya politik etnis dalam pilkada dapat dimaknai dari tidak adanya kepastian demokrasi di tingkat lokal. Dengan kata lain, demokrasi juga memaksa munculnya sebuah kompetisi yang keras untuk dalam hal perebutan kekuasaan. Meminjam istilah yang digunakan oleh Parsudi Suparlan yang tertuang dalam karya Bima Sugiarto bahwa mobilisasi jaringan etnis memang sengaja diciptakan untuk memenangkan sebuah persaingan dalam hal perebutan kekuasaan.

Ada beberapa faktor mengapa tarikan politik etnis semakin kuat dalam sistem pemilihan kepala daerah. **Pertama**, adalah menguatnya fenomena etnosentrisme dalam pemilihan kepala Daerah secara langsung yang acap kali melanggar aturan main dari tata cara demokrasi. Awal kemunculan hal ini sangat mudah ditebak dimana para calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif yang bertarung dalam sebuah kontestasi politik sangat mengagungkan simbol-simbol identitas yang dijadikan sebagai *vote getter*. **Kedua**, dalam hal regulasi dari UU pemilu, khususnya dalam pemilihan anggota legislatif yang berkaitan tentang penetapan calon terpilih. Pada prinsip awalnya penetapan calon terpilih memakai prinsip nomer urut bersyarat. Logikanya adalah sebuah partai yang mendapatkan kursi maka penetapan calon terpilih diberikan kepada nomer teratas, dengan syarat mereka mendapatkan perolehan suara sebesar 30% dari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Akan tetapi di pertengahan jalan sosialisasi pemilu legislatif beberapa partai politik besar seperti PAN Golkar, PBR dan PD menolak menggunakan sistem penetapan calon terpilih dan cenderung lebih memilih penggunaan sistem suara terbanyak. Perubahan ini ternyata disahkan oleh keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mensahkan sistem suara terbanyak sebagai aturan main dalam pencalonan anggota legislatif.

Disatu sisi keputusan MK ini memang memberikan dampak positif untuk mengurangi oligarkhi dari sebuah partai politik, akan tetapi dilain pihak dari keputusan ini menciptakan sebuah persaingan yang ketat bagi para kontestan yang berkeinginan untuk maju dalam pemilihan anggota legislative maupun menjadi kepala daerah. Di tengah-tengah dekatnya garis ideologi dari masing-masing partai, para calon anggota legislatif dituntut harus lebih kuat untuk menunjukkan karakter kandidat masing-masing. Dalam kondisi seperti ini tampaknya para calon anggota legislatif lebih cenderung bersikap pragmatis, karena program visi dan misi tidak lagi menjadi perhatian dari masyarakat, maka penggunaan jaringan *Patron Clients* sebagai pengikat

basis konstituen dan didukung dengan berbagai sumbangan berbentuk uang, maupun berbentuk sembako kerap menjadi pilihan utama bagi para calon anggota legislatif untuk mendapatkan simpati dari masyarakat (Mukmin dan Mubarak : 2009).

**Ketiga**, ketidakmampuan partai politik di daerah untuk menjalankan fungsi sebagai mana mestinya terkhusus dalam hal *civic education* dan pola *recruitmen politic* nya. Ada kesan bahwa partai politik hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk meloloskan kandidat tertentu dalam momen pilkada. Partai politik justru mencari elit-elit politik dari kalangan selebritis ataupun mencaplok elit politik di daerah yang memiliki basis jejaring-jejaring kekerabatan primordial dari paguyuban-paguyuban kelompok tertentu tanpa menghiraukan kualitas dan kapabilitasnya kepemimpinannya. Tak ayal bila saat ini paguyuban-paguyuban di daerah yang memiliki jaringan sampai kelapisan bawah masyarakat menjadi primadona pada saat momen pilkada berlangsung. **Keempat**, adalah lemahnya regulasi UU dari No 32/2004 yang tidak memuat ketentuan yang tegas mengenai batasan dan sanksi hukuman ketika munculnya isu-isu rasialis dalam setiap pilkada.

Awalnya, Pilkada serentak yang diwacanakan selama ini sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika Pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi. Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dibagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda hingga Pilkada selanjutnya.

### **Pergulatan Politik Identitas Dalam Pilkada**

Esensi dari etnis merupakan sebuah perwujudan dari politik, selain mengandung nilai-nilai tradisional yang menggunakan corak-corak tertentu, etnis juga merupakan sebagai mekanisme dari pensejajaran politik. Kelompok suku yang lain mungkin saja

untuk bersatu untuk memobilisasi di dalam pemilu, untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang baru (Abner Cohen: 83:1996). Sedangkan menurut Max Weber politik etnis adalah sekelompok manusia yang menghormati pandangan serta memegang kepercayaan bahwa asal yang sama menjadi alasan untuk menciptakan suatu komunitas tertentu. Pada perkembangannya sekarang politik ras selalu mempengaruhi negara, karena negara sebagai pihak yang mengalokasikan nilai-nilai yang terkait dengan kekuasaan, status, kemakmuran, serta kesempatan hidup kelompok rasras dan anggotanya. Politik etnik/ras dapat dibangkitkan oleh ketidak puasan sekelompok anggota masyarakat yang terkonsentrasi dalam suatu daerah yang ingin menuntut otonomi lebih besar.

Politik Identitas adalah merupakan sebuah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan (Abdillah : 2002). Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentifikasi mereka dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan rasa kebangsaan. Dalam konteks dinamika politik lokal di Sumatera Utara, maka pergulatan politik identitas etnis dalam perebutan tahta kekuasaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan di salah satu Kabupaten/Kota Sumatera Utara yakni Kota Tebing Tinggi memperlihatkan fenomena tersebut. Walaupun dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu di Kota Tebing Tinggi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, namun tetap ada beberapa pihak yang memainkan peranan etnis dalam Pilkada tersebut. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi yang berlangsung pada tanggal 08 Februari 2017 secara resmi dimenangkan oleh Ir. Umar Zunaidi Hasibuan dan Oky Doni Siregar. Namun, dibalik kemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota tersebut, terdapat pemilih kotak kosong, dimana berdasarkan hasil penelitian digerakkan oleh seseorang dari kalangan etnis tionghoa. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase kemenangan pasangan calon tunggal :

**Tabel 1. Perolehan Suara Pilkada 2017 Kota Tebing Tinggi**

<i>No</i>	<i>Nama Pasangan Calon</i>	<i>Perolehan Suara</i>
1.	Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar	41.937 suara (70,04%)
2.	Kotak Kosong	16.861 suara (28,16%)
3.	Suara Tidak Sah	1.070 suara (1,78%)
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	59.868 suara (100%)

*Sumber : Diolah dari PPID KPU Kota Tebing Tinggi 2017.*

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat perolehan suara Walikota *Incumbent* sebanyak 41.937 suara (70,04%). Sedangkan masyarakat yang memilih kotak kosong sebanyak 16.861 suara (28,16%), sedangkan suara tidak sah terhitung sebanyak 1.070 (1,78%). Dari perolehan suara dalam Pilkada Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 tersebut, Walikota *Incumbent* memperoleh suara terbanyak sehingga melanjutkan masa jabatan (dua periode) memimpin Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, terdapat 9 (sembilan) TPS yang dimenangkan oleh kotak kosong. Mayoritas penduduk yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) di TPS tersebut adalah etnis tionghoa. Di Kota Tebing Tinggi, terdapat sekitar 7% warga keturunan etnis tionghoa dari total jumlah penduduk 156.815 (data diperoleh melalui *website* BPS Kota Tebing Tinggi, diakses terakhir pada hari Kamis, 12 Juli 2018)).

**Tabel 2 Kotak Kosong/Kolom Kosong Menang di TPS se-Kota Tebing Tinggi**

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Suara Kotak Kosong	Suara <i>Incumbent</i>
1.	Bajenis	Bulian	1	75	72
2.	Bajenis	Bulian	8	118	104
3.	Bajenis	Pelita	2	98	83
4.	Padang Hilir	Damar Sari	3	77	43
5.	Padang Hilir	Tebing Tinggi	10	90	74
6.	Padang Hulu	Bandar Sono	9	90	87
7.	Padang Hulu	Lubuk Raya	4	97	93
8.	Rambutan	Sri Padang	5	145	138
9.	Tebing Tinggi Kota	Bandar Utama	3	83	72

Sumber : Diolah dari Form C1 Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel 2 diatas, kotak kosong menang di TPS 1 (satu) Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis dengan perolehan suara kotak kosong 75 suara dan perolehan suara Walikota *Incumbent* 72. Jumlah pemilih dalam TPS 1 (satu) tersebut sebanyak 269 orang, yang menggunakan hak pilih 148 orang dengan angka partisipasi 55,0%. Sedangkan di TPS 8 (delapan) Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis kotak kosong juga menang dengan perolehan 118 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 104 suara, dengan jumlah pemilih 335 orang. Yang menggunakan hak pilih di TPS 8 (delapan) tersebut yaitu sebanyak 170 orang dengan angka partisipasi 50,7%. Berikutnya di TPS 2 (dua) Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis kotak kosong juga

menang dengan memperoleh 98 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 83 suara dengan jumlah pemilih sebanyak 450 orang. Yang menggunakan hak pilih 186 orang dengan angka partisipasi 41,3%. Di Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Damar Sari TPS 3, kotak kosong menang dengan memperoleh 77 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 43 suara dengan jumlah pemilih 331 orang, yang menggunakan hak pilih hanya 123 orang dengan persentase 37,2%. Masih di Kecamatan Padang Hilir, tepatnya di Kelurahan Tebing Tinggi TPS 10 (sepuluh), kotak kosong menang dengan perolehan 90 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 74 suara dengan jumlah pemilih 373 orang. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 169 orang dengan angka partisipasi 45,3%. Di Kecamatan Padang Hulu, Kelurahan Bandar Sono TPS 9 (sembilan) kotak kosong juga menang dengan memperoleh 90 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 87 suara dengan jumlah pemilih 285 orang, yang menggunakan hak pilih 182 orang dengan angka partisipasi 63,9%.

Selanjutnya di Kelurahan Lubuk Raya TPS 4 (empat), kotak kosong memperoleh 97 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 93 suara dengan jumlah pemilih 348 orang, yang menggunakan hak pilih 193 orang dengan partisipasi 55,5%. Berikutnya di Kecamatan Rambutan, Kelurahan Sri Padang TPS 5 (lima), kotak kosong juga menang dengan perolehan 145 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 138 suara dengan jumlah pemilih 491 orang, yang menggunakan hak pilih 293 orang dengan angka partisipasi sebesar 59,7%. Dan yang terakhir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kelurahan Bandar Utama TPS 3 (tiga) kotak kosong menang dengan memperoleh 83 suara dan Walikota *Incumbent* memperoleh 72 suara dengan jumlah pemilih 389 orang, yang menggunakan hak pilih 157 orang dengan angka partisipasi 40,4%.

Politik identitas kadangkala akan menimbulkan pemikiran yang tidak rasional terhadap perilakunya. Ketidak rasionalitas ini akan terbawa kepada tingkat sensitifitas yang berlebihan terhadap suatu bentuk permasalahan antar etnis. Tidak rasionalitas juga akan membawa sebuah sifat yang radikal yang membuat suasana politik lokal kian memanas, yang nantinya akan menuju kepada sebuah konflik yang berlarut-larut. Meminjam istilah Benedict Anderson bahwa konsep bangsa Indonesia merupakan sebuah “*imajinasi*” merupakan sebuah konsekuensi yang memang harus diemban bangsa Indonesia ketika keragaman etnis yang selama ini menjadi kebanggaan sebagai pemersatu bangsa dapat menimbulkan sebuah bom waktu atas munculnya berbagai macam konflik komunal ketika masing-masing etnis saling mempertahankan eksistensi ditengah derasnya perubahan arus politik.

## Minimalisir Persinggungan Politik Identitas Etnis

Riswanda Imawan mengatakan bahwa *Demokrasi, Desentralisasi, dan Good governance* merupakan tiga pilar utama dalam reformasi politik yang terus diupayakan di Indonesia (Imawan : 2002). Desentralisasi merupakan cikal bakalnya lahirnya pemerintahan lokal, sebab disana terjadi pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah yakni adanya pemerintahan lokal. Sedangkan Demokratisasi adalah sebuah proses dari perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter kearah yang struktur yang dan tatanan yang lebih demokratis. Dalam hal politik identitas tentunya hal ini melahirkan kebebasan yang terjadi didalam masyarakat tanpa mengenal adanya unsure-unsur minoritas dan mayoritas. Sedangkan *Good Governance* di anggap cenderung dimasukkan kedalam unsur-unsur etika. Di lain pihak Pratikno mengatakan istilah *Governance* dan *Government* cenderung digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses pemerintahan dimana *Government* digunakan untuk merujuk pada pelaku (pemerintah) dan *Governance* biasanya digunakan untuk merujuk pada proses pemerintahan (Pratikno : 2005).

Menurut Horowitz sebagaimana sebenarnya konflik etnis-etnis di negara-negara berkembang sangat berkaitan erat dengan berlangsungnya modernisasi. Konflik antar etnis terjadi karena ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh beberapa etnis. Ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan dalam sector modern adalah sebab utama mengapa konflik sering kali terjadi. Disusul dari pergeseran ekonomi kemasalah politik yang akan menimbulkan konflik-konflik antara etnis. Tentunya konflik-konflik ini perlu dikelola dengan cara yang baik agar menjadi sebuah keanekaragaman dalam politik lokal.

Untuk meminimalisir ketidak rasionalitas antar etnisitas ini perlu dibangun sebuah *Consensus Building* yang akan memberikan solusi terhadap segala konflik yang terjadi. Sejenak kita akan menggunakan *governability* (praikno dan Lay : 2006) kedalam tataran pemerintahan lokal dimana kemampuan pejabat daerah untuk menggunakan fasilitas yang dimilikinya, seperti penciptaan *public sphere* yang akan menjamin hak untuk berpartisipasi dan berkompetisi dan sangat toleran terhadap segala perbedaan antar etnis yang ada. Otonomi daerah yang termaktub dalam UU No 22/1999 memang jauh lebih revolusioner dari pada UU N0 5/1974. Dalam pandangan ini kita sering terjebak dalam sebuah pengertian Otonomi daerah secara utuh. Pada saat sekarang ini

otonomi seperti hanya sebagai otonomi dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, dan bukan kepada otonomi masyarakat lokal itu sendiri. Kenyataan yang sering terlihat adalah otonomi hanya dinikmati oleh golongan elit politik daerah, dan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam beberapa etnis yang akan terus termarginalisasi dalam politik tingkat lokal. Oleh sebab itu konsep otonomi daerah harus menguatkan dan memberdayakan masyarakat lokal yang memiliki.

Kemampuan pemerintahan lokal dalam pengelolaan kepentingan antara etnis yang terjadi di Kota Tebing Tinggi sebaiknya mampu menjadi media diantara elit yang ada. selain menyediakan *public sphere*, yang lebih ditekankan adalah rasa penonjolan untuk membangun kabupaten tersebut, dan bukan kepada etnis mana yang berhak untuk membangun kabupaten tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ada yang menarik dari apa yang pernah diuraikan oleh lake dan Rothchild (1998) dia menawarkan beberapa point yang menarik jika diaplikasikan di Kota Tebing Tinggi, **Pertama**, saling menghormati, yaitu, salah satu landasan yang kuat dalam membangun Labuhan Batu untuk maju adalah bagaimana menata hubungan antar etnis kembali bersatu dengan penekanan saling menghormati dan jajaran pemerintahan dan birokrat lokal yang menjadi medianya. **Kedua**, yaitu berbagi kekuasaan dimana pembagian kekuasaan ini penting dalam mengurangi rasa tidak aman bagi dalam skope golongan minoritas. Dengan memberikan keanggotaan secara proporsional dalam pemerintahan lokal. Dan yang **Ketiga** adalah Manajemen konflik untuk mengatasi konflik etnis tersebut dengan menggunakan diplomasi preventif dengan mengedepankan tokoh-tokoh adat yang diantara masing-masing etnis saling mempunyai pengaruh.

### **Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017**

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Abdillah, 2002 : 16).

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009 : 14). Namun

demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan/*citizenship*). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu perbedaan (Setyaningrum, 2005 : 19). Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*politica of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.

Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka. Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya mengenai politik identitas. Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas“. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori perbedaan (Setyaningrum, 2005 : 26).

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda

antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.

Menurut Cressida Heyes (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdillah, 2002 : 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarginalkan dari kelompok mayoritas. Aspek etnis tidak boleh dilupakan perannya dalam politik lokal di Indonesia. Hal ini tampak pada proses pemilihan legislatif dan Pemilukada. Mobilisasi pemilih dapat dilakukan dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan etnisitas, baik etnis, agama dan sebutan penduduk asli atau pendatang. Banyak yang merasa bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang yang memiliki kebudayaan asing dan ingin mengintegrasikan kebudayaan tersebut ketengah masyarakat tempat mereka berada.

Walaupun jika ditinjau secara kuantitatif etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas dibandingkan dengan kelompok – kelompok etnis lain di Indonesia, namun secara kualitatif dampak yang mereka timbulkan begitu serius. Tahun 1961, jumlah mereka diperkirakan sebanyak 2,45 juta jiwa atau sekitar 2,5% dari total penduduk Indonesia waktu itu. Tarmizi Taher, mantan Menteri Agama era Orde Baru yang cukup perhatian dengan isu – isu Tionghoa, mengajukan taksiran yang lebih tinggi, yaitu antara 4-5 % dari keseluruhan penduduk Indonesia (Afif, 2012 : 2). Jumlah tersebut memang sangat kecil dibanding dengan suku – suku yang ada di Indonesia, namun peranan mereka yang sangat besar memberikan dampak yang besar juga dalam kehidupan mereka yakni masalah Tionghoa. Etnis Tionghoa yang selalu dipandang sebagai etnis yang eksklusif di Indonesia sementara masyarakat pribumi hidup dalam kesederhanaan yang menyebabkan kecemburuan sosial. Selain sikap mereka yang selalu di pandang eksklusif, sikap mereka yang tertutup dan cuek serta tidak ada interaksi dengan masyarakat sekitar atau dengan kata lain tidak ada pergaulan dengan masyarakat sekitar menambah kecemburuan sosial didalam masyarakat.

Hal ini kerap mengakibatkan konflik karena perbedaan pandangan. Oleh karena itu, perkembangan etnis Tionghoa mengalami pasang surut di Indonesia sejak masa Kolonial hingga Reformasi. Indonesia sebagai bangsa dengan beragam etnis dan budaya yang dipersatukan dalam sebuah semboyan yakni Bhineka Tunggal Ika.

Tebing Tinggi merupakan Kota di Sumatera Utara yang memiliki perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian. Hal ini karena letak Tebing Tinggi yang strategis karena jalur antar lintas Sumatera serta cepatnya Tebing Tinggi menjadi kota maju. Hal ini karena didukung oleh perdagangan, pendidikan, komunikasi dan sarana yang lengkap. Kota Tebing Tinggi terdiri dari berbagai macam etnis mulai dari etnis Cina, Melayu, Tapanuli, Jawa, Mandailing, Simalungun, Karo dan Minangkabau. Etnis Tionghoa yang berdomisili di Tebing Tinggi pada umumnya berprofesi sebagai pedagang ataupun pengusaha. Walaupun masih ada Etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai tukang, pedagang keliling, atau pun etnis Tionghoa kebun sayur yang memang sudah lebih berbaur dengan masyarakat.

Informasi yang diperoleh melalui informan etnis tionghoa. Melalui INTI (Indonesia Tionghoa) Kota Tebing Tinggi, salah seorang anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tebing Tinggi memberi himbauan atau ajakan untuk menggunakan hak pilih dengan mencoblos kolom kosong/kotak kosong. Namun ketika penulis berusaha menggali lebih mendalam alasan etnis tionghoa tersebut memilih kotak

kosong, informan tersebut hanya menyatakan disuruh oleh pengurus INTI tersebut. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, terdapat 9 (sembilan) TPS yang dimenangkan oleh kotak kosong. Mayoritas penduduk yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) di TPS tersebut adalah etnis tionghoa. Di Kota Tebing Tinggi, terdapat sekitar 7% warga keturunan etnis tionghoa dari total jumlah penduduk 156.815 (data diperoleh melalui *website* BPS Kota Tebing Tinggi, diakses terakhir pada hari Kamis, 12 Juli 2018).

## **Kesimpulan**

*Good Governance* dalam pengertian tingkat pelaku pemerintahan lokal dan *governability* tingkat kapabilitas pemerintahan lokal dalam memberikan *public sphere* akan membuka peluang bagi pemerintahan lokal yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk membangun struktur pemerintahan yang berdasarkan pada norma-norma lokal. Kita tidak dapat menutup mata, bahwa masyarakat lokal telah memiliki struktur-struktur tersendiri yang telah lama berdiri sebelum berdirinya struktur pemerintahan. Kita sama sekali tidak menginginkan negara teater seperti apa yang terbayang dalam negara teater yang terdapat dalam karya Clifford Geertz, yang mengedepankan bahwa etnis mayoritas akan selalu menjadi pemimpin, sedangkan etnis minoritas hanya akan menjadi *follower*. Tentunya kearifan lokal dan lebih mengedepan sifat pluralisme menjadi kata kunci untuk lebih menghidupkan kehidupan berdemokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 memang ada peranan etnis tertentu yang mendukung kotak kosong, namun memang harus diakui bahwa mayoritas penduduk Kota Tebing Tinggi merupakan masyarakat lokal, sehingga masyarakat lebih percaya terhadap pemimpin lokal yang berasal dari penduduk asli Kota Tebing Tinggi.

## **Daftar Pustaka**

- Adillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Indonesia Tera, Magelang.
- A. D, Lake dan Rothchild, Donald. 1998. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation*, Princenton University Press.
- Afif, Afthonul. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia : Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok, Kepik.
- Agustino, Leo. 2002. *Kekerasan dan Pengendalian Konflik*. Analisis CSIS. Jakarta.

- Cohen, A. 1996. "*Etnicity and Politics*". dalam *Etnicity*. J.Hutchinson dan A.D. Smith (ed). Oxford University Press. New York.
- \_\_\_\_\_. 1969. *Custom and Politics In Urban Africa*. Routledge. London.
- Cressida J. Hayes. 2007. *Self-Transformation : Foucault, Ethics and Normalizes Bodies*. Oxford University Press.
- I. Riswanda. 2002. *Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Sebuah makalah dalam workshop Desentralisasi di Indonesia. Semarang 25-27 Maret.
- Pratikno. 2005. *Good Governance dahn Governability*. dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, edisi 3 Maret.
- Setyaningrum, Arie. 2005. "*Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas Dalam Wacana Politik Poskolonial*" Dalam *Politik Perlawanan*. Yogyakarta : IRE
- Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter : Pergulatan Identitas*. UGM, Yogyakarta.